

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh karena itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting, tidak ada satu negara pun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.

Pada saat ini terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah : modal ventura, anjak piutang, dana pensiun dan pegadaian. Lembaga keuangan bank di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan

bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (UU, No. 21 Tahun 2008).

Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syariah. (Muhammad, 2001:1)

Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah : berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (*Murabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*Mudharabah*), pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (*Salam*), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (*Istishna'*), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*Ijarah*), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk

memenuhi kewajiban pihak kedua (*Kafalah*), pengalihan hutang (*Hawalah*) dan pemberian harta kepada orang lain agar dapat ditagih dan diminta kembali (*Qardh*).

Salah satu produk unggulan pembiayaan perbankan syariah adalah produk pembiayaan murabahah. Murabahah hakikatnya jual beli, dimana masing-masing yang terlibat dalam transaksi jual beli membuat suatu kesepakatan yang kemudian kesepakatan ini dalam istilah perbankan syariah dituangkan dalam nota akad. Aplikasi murabahah dalam perbankan syariah dapat dikategorikan pada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumsi nasabah, antara lain : pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang terkait dengan modal kerja dan investasi.

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang menjalankan konsep Murabahah berdasarkan PSAK No. 102, yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Bank ini memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

PSAK No. 102 merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi

yang dipakai dilembaga perbankan syariah. Sejalan dengan hal tersebut, sistem jual beli dalam produk pembiayaan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah adalah pembiayaan Murabahah. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, ditemukan bahwa diantara empat produk pembiayaan yang ditawarkan yaitu Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Al-Qardh. Produk pembiayaan yang paling dominan diminati oleh nasabah adalah pembiayaan murabahah.

Menurut Muhammad (2005:121), sejumlah alasan untuk menjelaskan popularitas murabahah dalam operasi investasi perbankan Islam, yaitu : (1) Murabahah adalah suatu mekanisme jangka pendek dan dibandingkan dengan sistem *Profit and Loss Sharing* cukup memudahkan; (2) *Mark up* dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; (3) Murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis *Profit and Loss Sharing*.

Dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa bank syariah lah yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan murabahah tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, dimana bank ini memberikan wewenang kepada nasabahnya untuk melakukan

pembelian barang, sehingga akan terdapat perbedaan perlakuan akuntansi menurut PSAK No. 102 dan yang diterapkan oleh bank. Dengan demikian, perlu kiranya dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana penerapan PSAK No. 102 terhadap pembiayaan murabahah di lembaga tersebut. Dari data-data yang diperoleh pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Pertama, pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling besar dijalankan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah. Pada tahun 2012 PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah menyalurkan pembiayaan murabahah sebesar Rp.6.564,559, dimana dalam akad pembiayaan murabahah PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah menyerahkan barang yang dibeli oleh nasabah. Dalam kenyataannya tidak semua akad pembiayaan murabahah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah menyerahkan barang. Seharusnya PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah tidak menyerahkan uang tetapi barang. Menurut PSAK No. 102 tentang murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Sebagaimana ilustrasi contoh yaitu : pada 10 Juli 2012 Pak Hendra mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris untuk pembelian sepeda motor Yamaha Mio yang akan diambil di dealer yamaha Air Tiris dengan harga Rp.15.500.000,-. Setelah dilakukan negosiasi akhirnya pihak Bank menyetujui permohonan tersebut. Dengan ketentuan Bank mengambil keuntungan 20% dari harga

perolehan, sehingga Bank menjual sepeda motor tersebut kepada pak Hendra dengan harga Rp.18.600.000,- dan angsuran dilakukan selama tiga puluh bulan yakni sebesar Rp.517.000,-/bulan. Setelah kesepakatan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak, kemudian dilakukan penanda tangan pembiayaan murabahah antara pihak Bank dengan pak Hendra. Setelah penanda tangan pembiayaan murabahah tersebut bank memberikan uang sebesar Rp.15.500.000,- kepada pak Hendra untuk membeli sepeda motor tersebut.

Kedua, penerapan denda PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah didalam pembiayaan murabahah dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad. Denda yang dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad maka denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Seharusnya PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah memasukkan denda kedalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Menurut PSAK No. 102 paragraf 29 denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Ketiga, pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris belum menyajikan laporan keuangan secara lengkap, karena belum menyajikan semua komponen laporan keuangan, Padahal menurut PSAK No. 102 yang merujuk pada PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syari'ah menyatakan bahwa laporan keuangan bank syari'ah yang lengkap terdiri dari sembilan komponen yaitu neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan

rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas, maka timbul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dalam ruang lingkup terbatas dalam pembahasan skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syari’ah Berkah Dana Fadhlillah (BPRS) Air Tiris”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini apakah penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah telah sesuai dengan PSAK No. 102 dan untuk mengetahui mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dengan PSAK No.102.

- b. Untuk mengetahui mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Memperluas pengetahuan penulis tentang perbankan syariah terutama berkaitan dengan penerapan pembiayaan murabahah untuk perbankan syariah.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai informasi tambahan bagi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah.

3. Bagi peneliti

Sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang analisis penerapan pembiayaan murabahah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri menjadi enam bab, masing-masing bab akan membahas permasalahan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teoritis tentang produk perbankan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, bagi hasil, murabahah ,akuntansi murabahah dan pajak.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan aktivitas perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi murabahah, penyajian laporan keuangan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab terakhir skripsi ini, penulis mencoba menarik kesimpulan dan mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan.